

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh :**

**BERLIANTA H.M. SITIO**

**NIM : 068320166**



**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

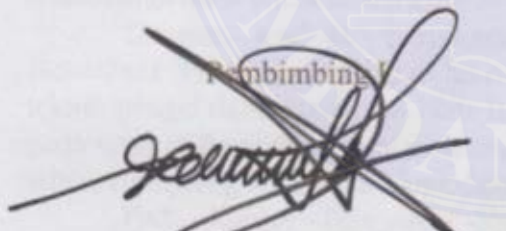
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH BENDAHARA  
PENGELUARAN PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

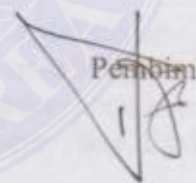
NAMA : BERLIANTA H.M. SITIO


NIM : 068320166

JURUSAN : MANAJEMEN

Menyetujui :  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I  
  
(Drs. MUSLIM WIJAYA, M.Si)

Pembimbing II  
  
(HERY SYAHRIAL, S.E., M.Si)

Ketua Jurusan  
  
(IHSAN EFFENDI, S.E., M.Si)

Dekan  
  
(Prof. Dr. H. SYA'AD AFIFUDDIN, S.E., M.Ec)

## ABSTRAK

Berhianta H.M. Sitio

Skripsi

Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Bendahara Pengeluaran memiliki tanggung jawab pribadi atas pengelolaan Keuangan Anggaran Belanja. Dalam pelaksanaannya Bendahara harus tunduk dan patuh pada peraturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu bendahara harus cermat dan penuh kehati-hatian dalam bertindak. Selain itu, bendahara harus tetap dalam pengawasan atasan langsung untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dikelolanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh Bendahara Pengeluaran secara umumnya pada instansi pemerintahan, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dapat kita lihat dalam pembukuan, pelaporan dan mekanisme pencairan anggaran.

Pelaksanaan anggaran telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah realisasi anggaran. Adapun realisasi anggaran sampai dengan bulan Mei tahun 2009 untuk realisasi belanja barang sebesar 14,54 % dan realisasi belanja pegawai sebesar 34,34 %. Dan untuk belanja modal tidak ada realisasi karena tidak tersedianya dana untuk tahun 2009.

Dengan analisis pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh Bendahara Pengeluaran dapat diketahui bahwa masih diperlukannya perunjuk teknis pengelolaan keuangan oleh Bendahara, karena peraturan yang ada masih pada tingkat Peraturan Menteri Keuangan dan aturan yang dipakai adalah aturan tahun 1968 yang *nota bene* harus diperbarui.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Pengelolaan Keuangan oleh Bendahara telah mampu menunjukkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada dan dalam pengendalian internal yang memadai.

Kata Kunci :

Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban Anggaran, Bendahara Pengeluaran, pembukuan, pelaporan, dan mekanisme pencairan anggaran.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan tugas akhir yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur” ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan S-1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Tahun 2009.

Dalam penulisan skripsi ini, begitu banyak pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Muslim Wijaya, M.Si, sebagai pembimbing I;
3. Hery Syahrial, S.E., M.Si sebagai pembimbing II;
4. Agustiono, S.E., MMA, sebagai Sekretaris;
5. Drs. H.M. Akbar Siregar, M.Si, sebagai Ketua;
6. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah membagikan pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
7. Bapak Reguel Simamora, S.H., M.M., selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dan semua pihak yang telah memberikan

ijin dan membantu penulis dalam memperoleh data dan mengumpulkan data penelitian;

8. Suami tercinta dan anakku Natanael Manurung, kedua orang tua, adikku Evanny Sitio serta saudara-saudaraku yang dengan gigih memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Cut Azmi Syah Putri, Theresia Octaviani, Leonard Simorangkir, Menawastuny Munthe yang telah menjadi teman yang baik dan selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulisan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis tidak menutup kemungkinan adanya kritik maupun saran yang membangun demi pemaikan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan oleh Bendahara dan bermanfaat bagi penulis khususnya.

Medan, .....2009

Penulis

Berlianta H.M. Sitio



## DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	<b>5</b>
A. Uraian Teoritis	5
1. Anggaran	5
a. Pengertian Anggaran	5
b. Belanja Negara	5
c. Pejabat yang terkait dengan pengeluaran anggaran	17
2. Pelaksanaan Anggaran	21
a. Model Pencairan Dana	21
b. Prosedur Pencairan Anggaran	28
c. Pajak Untuk Bendaharawan	34
3. Pertanggungjawaban Anggaran	35
a. Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran	35
b. Pelaporan Realisasi Anggaran	36
B. Kerangka Konseptual	37

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	39
	A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
	B. Populasi dan Sampel .....	40
	C. Definisi Operasional .....	41
	D. Jenis dan Sumber Data .....	44
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
	F. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	46
	A. Hasil .....	46
	1. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak .....	46
	2. Struktur Organisasi .....	48
	3. Mekanisme Pembayaran Anggaran Belanja .....	54
	4. Tata Cara Verifikasi Pembayaran Tagihan Yang di Bebankan Pada UP .....	55
	5. Tata Cara Pelaksanaan Penutupan Buku Kas Umum ...	57
	6. Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Melalui Mekanisme LS Kepada Rekanan .....	57
	7. Dokumen yang dihasilkan .....	59
	8. Hambatan Yang dihadapi dan Cara Mengatasinya ....	60
	B. Pembahasan .....	61
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	64
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	65

Daftar Pustaka

Lampiran

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Proses Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.....	37
2 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.....	49





## DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Jadwal Penelitian.....	40
2 Analisis Dokumen Data BKU.....	61
3 Analisis Dokumen Data SPP dan SPM.....	62
4 Realisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 Surat Pernyataan Pembayaran (SPP).....	66
2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).....	67
3 Kuitansi LS.....	68
4 Kuitansi LP.....	69
5 Ringkasan Kontrak.....	70
6 Surat Perintah Membayar (SPM).....	71
7 Surat Perintah Pencairan Dana.....	72
8 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Tingkat KPPN.....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan "Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah." Sehubungan dengan hal tersebut dalam pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah, sesuai dengan fungsinya bendahara dibagi menjadi dua yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

"Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah, sedangkan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari-hari yang dilaksanakannya, dengan memperbitungkan kewajiban-kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara. Pada akhir tahun anggaran, Bendahara

Pengeluaran wajib menyetorkan seluruh sisa Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan ke Kas Negara.

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan cara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya, dan setiap bulannya dibuat laporan realisasi anggaran belanja.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan ditutup setiap akhir bulannya yang selanjutnya dengan dilaksanakannya pemeriksaan kas oleh atasan terhadap bendahara pengeluaran. Untuk tercapainya pengelolaan keuangan negara yang transparan maka setiap bulan harus dibuat laporan pertanggungjawaban termasuk didalamnya neraca, laporan realisasi anggaran belanja, laporan realisasi anggaran pengembalian belanja, laporan realisasi anggaran pendapatan negara dan laporan realisasi anggaran pengembalian pendapatan negara.

Pada kenyataannya proses pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh bendahara pengeluaran secara umum masih terdapat beberapa permasalahan yaitu pembukuan bendahara tidak konsisten karena menggunakan asas bruto dan atau neto, pemeriksaan kas dan penutupan pembukuan bendahara tidak tepat waktu karena lemahnya pengendalian internal yang dilakukan oleh atasan. Demikian juga halnya dengan laporan realisasi anggaran termasuk realisasi anggaran belanja, pengembalian belanja, pendapatan negara dan pengembalian pendapatan masih ada yang dilaporkan terlambat. Dari uraian tersebut di atas,

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Dacrah**, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Buku Satu, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, 2002.
- Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Buku Dua, Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat, 2002.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**, Jakarta, 2005.
- Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.
- Pemerintah Republik Indonesia. **Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**, Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan, Jakarta, 2004.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Negara**, Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan, Jakarta, 2004.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**, Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan, Jakarta, 2004.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemhayaran ata Beban APBN**, 2005.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, Jakarta, 2005.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007**, Jakarta, 2007.
- T. Hani Handoko, **Pengantar Manajemen**, Buku Satu, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta, 2000.